

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak dimulainya Era Reformasi yang ditandai dengan runtuhnya kekuasaan Orde Baru dibawah kepemimpinan Soeharto pada 21 Mei 1998, terjadi perubahan yang sangat signifikan dalam sistem politik di Indonesia. Peralihan sistem politik dari otoriter ke demokrasi telah membawa perpolitikan Indonesia ke arah yang lebih demokratis dari pada sebelumnya. Perubahan politik terjadi di berbagai sektor salah satunya dalam sistem kepartaian dimana pasca amandemen UUD 1945 keran kebebasan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat dibuka sebagai wujud demokratisasi.

Sebagai akibat dari adanya kebebasan tersebut, berbagai pihak berlomba-lomba untuk mendirikan partai politik. Seperti dikutip dari Romli (2011, hal. 200) pada awal Reformasi jumlah Parpol yang didirikan mencapai 184 partai dan 141 diantaranya memperoleh pengesahan sebagai organisasi yang berbadan hukum. Dari jumlah tersebut, yang memenuhi syarat untuk ikut Pemilu 1999 hanya 48 Parpol. Menghadapi Pemilu 2004, jumlah Parpol yang dibentuk semakin banyak. Ada sekitar lebih dari 200 Parpol yang berdiri.¹ Dari jumlah Parpol sebanyak itu hanya 50 Parpol yang memperoleh pengesahan sebagai organisasi berbadan hukum dan hanya 24 Parpol yang ikut Pemilu 2004.

¹ Berdasarkan data dari Romli (2009, hal. 50) dalam artikelnya yang berjudul Peta Kekuatan Politik Hasil Pemilu 2009, jumlah parpol yang didirikan ada 237 partai politik.

Pada Pemilu 2009, jumlah Parpol yang dibentuk sekitar 132 partai, dan sekitar 22 partai politik lolos verifikasi sehingga dapat ikut Pemilu ditambah dengan 16 partai politik, yang terdiri atas 7 partai politik yang lolos ET 3% dan 9 partai politik yang mendapat kursi di DPR. Jumlah partai politik peserta Pemilu 2009 semuanya menjadi 38 partai di tingkat nasional dan 6 partai lokal di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) (Romli, 2011, hal. 200). Diantara 38 Parpol peserta Pemilu tahun 2009 tersebut, salah satunya adalah Partai Gerindra. Partai Gerakan Indonesia Raya atau Partai Gerindra dibentuk pada 6 Februari 2008 atas dasar keprihatinan akan kondisi politik Indonesia yang pada saat itu dianggap telah jauh dari nilai-nilai demokrasi yang sesungguhnya (Partai Gerindra, 2022).

Meskipun tergolong kedalam sebuah Parpol baru, namun Partai Gerindra mampu mendapatkan kepercayaan rakyat dimana pada Pemilu tahun 2009 Partai Gerindra mendapatkan perolehan suara yang cukup besar. Partai Gerindra mendapatkan perolehan suara sebanyak 4.646.406 suara dengan persentase sebesar 4,46% suara. Dari hasil tersebut Partai Gerindra mampu menempati urutan ke-8 dari 38 Parpol peserta Pemilu dan berhasil menempati 26 kursi di DPR RI. Hasil tersebut cukup baik mengingat posisi Partai Gerindra yang tergolong sebagai partai baru yang bahkan pembentukannya pun terbilang mendesak karena berdekatan dengan pendaftaran dan masa kampanye Pemilu tahun 2009.

Sejak keikutsertaannya pada Pemilu tahun 2009, Partai Gerindra terus berkembang menjadi sebuah partai besar yang elektabilitasnya terus mengalami peningkatan pada Pemilu-Pemilu selanjutnya baik di tingkat pusat maupun di

tingkat daerah. Hal tersebut dapat kita lihat pada Pemilu tahun 2014 dimana Partai Gerindra berhasil menempati posisi ke-3 di bawah PDIP dan Partai Golkar dengan perolehan suara sebanyak 14.760.371 suara dengan persentase sebesar 11,81% dan berhasil menempati 73 kursi di DPR.

Kemudian pada Pemilu serentak tahun 2019, elektabilitas Partai Gerindra juga cenderung mengalami kenaikan. Hal itu dilihat dari hasil perolehan suara Partai Gerindra yang berhasil mendapatkan perolehan suara sebanyak 17.596.839 dengan persentase sebesar 12,57% dari total suara sah dan berhasil menempati 78 kursi di DPR.

Secara lebih jelas, perbandingan perolehan suara Partai Gerindra pada Pemilu tahun 2009, 2014 dan 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Perbandingan Perolehan Suara Partai Gerindra Pada Pemilu Anggota DPR RI Tahun 2009, 2014 dan 2019

No	Tahun	Perolehan Suara	Persentase	Perolehan Kursi	Urutan Parpol
1	2009	4.646.406	4,46 %	26	8
2	2014	14.760.371	11,81 %	73	3
3	2019	17.596.839	12,57 %	78	3

Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2015; Kompas.com, 2019)

Peningkatan elektabilitas Partai Gerindra yang tercermin dari perolehan suara dalam Pemilu di tingkat pusat juga diiringi oleh peningkatan elektabilitas partai di tingkat daerah, salah satunya di wilayah Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Berdasarkan data rekapitulasi suara hasil Pemilu legislatif Kabupaten Ciamis tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ciamis, Partai Gerindra mendapatkan perolehan suara sebanyak 30.256 suara atau sebesar

3,68% dari total suara sah dan menempati urutan ke-10 dari 38 partai politik peserta Pemilu serta berhasil menempati 1 dari 50 kursi di DPRD Kabupaten Ciamis.

Selanjutnya pada Pemilu legislatif tahun 2014, berdasarkan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten Ciamis yang diuraikan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Ciamis yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Ciamis, Partai Gerindra memperoleh suara sebanyak 44.549 suara atau sebesar 4,97% dari jumlah suara sah, menempati urutan ke-8 dari 15 partai peserta Pemilu serta dapat menduduki 1 kursi di DPRD Kabupaten Ciamis.

Kemudian, pada Pemilu serentak tahun 2019, perolehan suara Partai Gerindra mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Ciamis nomor: 97/Pl.01.7-Kpt/3207/Kpu-Kab/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019, Partai Gerindra berhasil mendapatkan perolehan suara sebanyak 85.181 suara dan berhasil menempati urutan ke-3 di bawah PDIP dan PKS serta berhasil menduduki 7 kursi di DPRD Kabupaten Ciamis.

Secara lebih jelas, perbandingan perolehan suara tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.2
Perbandingan Perolehan Suara Partai Gerindra Pada Pemilu Anggota
DPRD Kabupaten Ciamis Tahun 2009, 2014 dan 2019

No	Tahun	Perolehan Suara	Persentase	Perolehan Kursi	Urutan Parpol
1	2009	30.256	3,68 %	1/50	10
2	2014	44.549	4,97 %	1/50	8
3	2019	85.181	11,95 %	7/50	3

Sumber : KPU Kabupaten Ciamis (2009, 2014, dan 2019)

Berdasarkan data yang telah diuraikan diatas dapat kita lihat bahwa dalam setiap Pemilu, perolehan suara Partai Gerindra selalu mengalami peningkatan, terlebih pada Pemilu tahun 2019 yang mana peningkatan perolehan suara Gerindra mencapai 91% dibanding tahun 2014. Kemudian, dari jumlah suara sah yang didapatkan, Partai Gerindra berhasil menempatkan 7 orang wakilnya dalam susunan anggota DPRD Kabupaten Ciamis periode 2019-2024. Perolehan ini sangat berbanding jauh jika dibandingkan dengan tahun 2009 dan 2014 yang mana Partai Gerindra hanya berhasil menempati 1 kursi di DPRD. Hal ini menunjukkan bahwa elektabilitas Partai Gerindra mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Ciamis.

Peningkatan elektabilitas tersebut memberikan pengaruh terhadap iklim persaingan dan peta kekuatan partai politik di Kabupaten Ciamis. Pada dua Pemilu sebelumnya yakni tahun 2009 dan 2014 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP menjadi partai yang selalu mendominasi dengan perolehan suara dan perolehan kursi terbanyak di DPRD Kabupaten Ciamis, disamping itu ada Golkar, Demokrat, PKS, PPP, PAN dan PKB. Akan tetapi pada Pemilu tahun 2019 Partai Gerindra muncul dalam persaingan politik di Kabupaten Ciamis.

Kehadiran Partai Gerindra tersebut tampaknya cukup mempengaruhi dominasi PDIP sebagai partai pemenang dalam dua kali Pemilu di Ciamis. Data hasil Pemilu di Kabupaten Ciamis dari KPU Ciamis menunjukkan adanya penurunan dalam perolehan suara dan perolehan kursi PDIP pada Pemilu tahun 2019 dimana PDIP mendapatkan 17,49% suara dan 9 kursi di DPRD, padahal dalam dua Pemilu sebelumnya, PDIP konsisten mendapatkan perolehan suara diatas 20% dan perolehan kursi diatas 10 kursi. Sementara itu persaingan partai-partai lain cenderung masih stabil, penurunan maupun peningkatan dalam perolehan suara dan perolehan kursi tidak terlalu signifikan.²

Pelaksanaan Pemilu yang dilakukan secara serentak disinyalir menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan elektabilitas Partai Gerindra. Survei dari Charta Politika pada 19-25 Maret dan dirilis pada 4 April 2019 melihat adanya indikasi kemunculan fenomena *Coattail Effect* atau Efek Ekor Jas³ yang terjadi dalam Pemilu 2019 khususnya bagi Partai Gerindra. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 34,9% responden memilih Partai Gerindra karena alasan tertarik dengan figur Prabowo. Kemudian, 30,6% responden memilih Gerindra karena mengukung Prabowo-Sandi di Pilpres. (Ihsanudin, 2019)

² Lihat Lampiran VII Dokumentasi Pendukung Pra Penelitian

³ *Coattail effect* adalah istilah yang merujuk pada suatu tindakan yang menimbulkan pengaruh pada tindakan lain (pengaruh ikutan). Dalam terjemahan bebas diartikan sebagai efek kibanan buntut jas. Calon pemimpin yang diusung memiliki efek buntut jas terhadap elektabilitas suara pada partai pengusung nantinya. Karena pemilihan presiden bersamaan dengan pemilihan anggota legislatif, maka tentunya pilihan rakyat terhadap pasangan capres dan cawapres tidak jauh dari calon anggota dewan dari partai pengusungnya. Hal ini tentu berakibat pada sinergitas antara eksekutif terpilih dengan anggota dewan di parlemen nantinya (Haris dalam Yunus, 2018). Efek ekor jas dapat dimaknai sebagai pengaruh figur dalam meningkatkan suara partai di Pemilu. Figur tersebut bisa berasal dari capres ataupun cawapres yang diusung (Rif'an, 2018)

Coattail Effect dari pengusungan Prabowo-Sandi dalam Pilpres 2019 juga dirasakan oleh partai lain seperti PAN dan PKS. Sebanyak 20 persen dari pemilih PKS menyatakan memilih partai tersebut karena mengusung Prabowo-Sandi disusul faktor lain seperti 7 persen terbiasa memilih partai tersebut; 6 persen tertarik pada program partai; 4 persen tertarik pada figur caleg partai; lalu masing-masing 1 persen memilih PKS karena tertarik pada iklan/spanduk/baliho; tertarik pada sosok Sohibul Iman sebagai Presiden PKS; dan pernah mendapat sesuatu dari partai. (Bomantama, 2019)

Lalu sebanyak 16,9 persen pemilih PAN menyatakan dukung Prabowo-Sandi; diikuti faktor 9,2 persen memilih partai karena tertarik pada figur caleg; 6,2 persen terbiasa memilih partai tersebut; lalu sebanyak 3,1 persen masing-masing memilih PAN karena tertarik pada program partai; tertarik pada sosok Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan; pernah mendapat sesuatu dari partai; dan lainnya. (Bomantama, 2019)

Efek ekor jas ini juga bukan merupakan fenomena yang pertama kali terjadi dalam Pemilu, pernyataan lain menunjukkan bahwa efek ekor jas juga pernah terjadi pada 3 kali Pemilu sebelumnya yakni, 2004, 2009 dan 2014. Hal tersebut terjadi pada Partai Demokrat dan PDIP dengan figur Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo.

Partai Demokrat yang baru berdiri 2001 tiba-tiba memperoleh suara signifikan pada Pemilu 2004. Bahkan pada 2009 menjadi pemenang Pemilu. Rupanya, ketokohan SBY turut mempengaruhi tingkat perolehan Partai Demokrat di dua Pemilu tersebut. Publik memilih Demokrat lantaran partai tersebut identik

dengan figur SBY yang saat itu merupakan presiden dengan tingkat elektabilitas dan kepuasan publik yang tinggi. (Rif'an, 2018)

Hal sama terjadi pada Pemilu 2014. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menikmati efek ekor jas dari figur Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, kini saat elektabilitas dan tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi terus meningkat, tingkat keterpilihan PDIP pun semakin meroket dalam sejumlah hasil survei terakhir. (Rif'an, 2018)

Kemudian, dalam artikel yang ditulis oleh Amalia Salabi di laman Rumah Pemilu, ia menyimpulkan bahwa *Coattail Effect* dari pasangan calon Prabowo-Sandi cukup signifikan terjadi pada partai politik asal calon, yakni Partai Gerindra. Adapun PKS, basis massa partai inilah yang memberikan *Coattail Effect* kepada Prabowo-Sandi bukan sebaliknya. Prabowo-Sandi menang di 8 daerah basis massa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan persentase 22,2 persen. Artinya, figur Prabowo-Sandi cukup melekat dengan PKS. Basis massa PKS yang cukup besar menyumbang suara untuk pasangan calon (paslon) ini. Di semua dapil dengan perolehan suara PKS yang cukup besar (yakni antara 14 sampai 19,9 persen), Prabowo memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres). Tapi, tak semua dapil yang dimenangkan Prabowo-Sandi memberikan suara besar kepada PKS. (Salabi, 2021)

Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh Kartikasari (2020, hal. 95) ia menyimpulkan bahwa ada persamaan antara Gerindra dan PKS dalam melakukan strategi terkait pemanfaatan pada figur Prabowo adalah mereka melakukan kampanye dengan terus membawa nama Prabowo serta menekankan visi-misi serta program kampanye beliau baik dengan bertemu langsung dengan masyarakat

ataupun dengan menggunakan sosial media. Dalam hal ini Gerindra cukup diuntungkan sebagai partai asal Prabowo, hal ini ternyata juga mempengaruhi pilihan *swing voters* pada hari-H pemilihan mencapai 20% suara. Yang membedakan kedua partai ini diluar pemanfaatan Prabowo adalah adanya temuan terkait praktik *money politic* oleh Gerindra dalam menunjang suara mereka pada Pemilu 2019 di Kota Padang.

Selanjutnya, pemanfaatan visualisasi Alat Peraga Kampanye (APK) oleh Gerindra dan PKS selain menjadi pertanda bahwa mereka secara maksimal dalam mendukung kemenangan Prabowo pada Pilpres, hal ini juga dilakukan untuk menarik perhatian masyarakat untuk memperkenalkan siapa saja calon legislatif yang maju dari partai mereka dengan menyandingkan foto caleg tersebut bersama foto Prabowo disetiap APK yang dipasang baik berupa baliho, poster ataupun selebaran yang dibagikan pada masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Nur Rohim Yunus bahwa dalam pemanfaatan *coattail effect* Gerindra dan PKS berlomba-lomba mengidentikkan partai mereka dengan sosok Prabowo melalui visualisasi APK. (Kartikasari, 2020, hal. 96)

Penelitian tersebut juga didukung oleh pernyataan dari Bapak Wawan Hanurawan selaku Ketua PAC Gerindra Kecamatan Sadananya dalam wawancara pra penelitian yang membenarkan adanya pemanfaatan figur Prabowo Subianto dalam kampanye yang dilakukan oleh Partai Gerindra untuk mendapatkan suara.⁴ Selain itu, dalam arsip sekretariat DPC Partai Gerindra Kabupaten Ciamis

⁴ Lihat Lampiran IV Hasil Wawancara Pra Penelitian

ditemukan atribut kampanye salah satu caleg yang menyandingkan foto dan slogannya dengan foto Prabowo dan Sandiaga Uno selaku capres dan cawapres⁵.

Hal tersebut juga diperkuat dengan data hasil Pilpres yang menunjukkan bahwa Capres nomor urut 2 mendapatkan perolehan suara sebesar 59,21% atau sebanyak 440.240 suara sedangkan Capres nomor urut 1 mendapatkan perolehan suara sebesar 40,79% atau sebanyak 303.323 suara.⁶ Dengan perbandingan suara yang cukup jauh tersebut maka dapat dikatakan bahwa Kabupaten Ciamis merupakan wilayah dengan basis pemilih Prabowo Subianto. (KPU RI, 2019)

Melihat fenomena diatas, penulis juga menduga bahwa ada faktor lain yang berperan penting dalam kemenangan Partai Gerindra di Kabupaten Ciamis, yakni faktor kultur sosio-religi masyarakat Kabupaten Ciamis. Seperti kita ketahui bahwasannya politik identitas sangatlah kental terasa dalam gelaran Pemilu 2019. Nuansa politik identitas sudah terasa sejak terjadinya Aksi 411 dan 212 yang menuntut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok atas dugaan kasus penistaan agama. Politik identitas semakin menguat ketika masuk pada gelaran Pilkada di Jakarta yang mempertemukan 3 pasangan calon yakni Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylvia Murni, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Syaiful Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Pilkada Jakarta menyuguhkan suatu peristiwa politik yang oleh sebagian orang dianggap sebagai menguatnya politik identitas dan atau politik Islam. Gubernur petahana saat itu, Basuki Tjahaja Purnama alias “Ahok”, dikalahkan oleh

⁵ Lihat lampiran VII Dokumentasi Pendukung Pra Penelitian

⁶ Lihat lampiran VII Dokumentasi Pendukung Pra Penelitian

Anies-Sandi, namun Pilkada DKI juga turut diwarnai dengan masalah penistaan agama dan keberhasilan GNPf MUI memobilisasi demonstrasi besar di Monas (aksi 411 dan 212). GNPf MUI juga berhasil mengorganisasikan koalisi kelompok-kelompok konservatif dan Islam garis keras. (Irawan, 2018).

Pasca Pilkada Jakarta 2017, banyak pengamat memprediksi kekuatan “Islam Politik” akan memainkan peran yang signifikan di momen Pilkada serentak 2018, termasuk pemilihan gubernur di lima provinsi yang disebutkan di atas. Politik identitas masih akan menjadi ancaman bagi pesta demokrasi pilkada serentak 2018 dan pemilu 2019. (Irawan, 2018)

Sementara itu, para “alumni” aksi 212 telah membentuk berbagai organisasi seperti “Alumni 212”. Mereka telah dengan tegas menyatakan kelompok mereka akan mendorong dan mengkampanyekan kandidat-kandidat yang dianggap sebagai Muslim yang taat. Dalam bahasa mereka adalah “mereka yang memperjuangkan kepentingan masyarakat muslim Indonesia, dan mereka juga akan melawan segala upaya “kriminalisasi ulama”. Istilah kriminalisasi ulama ini mengacu pada usaha Polri untuk mengusut perkara Rizieq Shihab dan Muhammad al Khaththath. (Irawan, 2018)

GNPF MUI (kemudian GNPf Ulama) telah menyerukan kepada para pendukungnya agar tidak memilih para kandidat dari partai-partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan Jokowi. Sebaliknya, menyerukan untuk memilih Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 dan partai-partai pendukung mantan Danjen Kopassus itu. Partai-partai politik tersebut adalah Gerindra, PKS, dan PAN (Arifianto dalam Irawan, 2018).

Dugaan kuat penulis juga berdasarkan pada keterlibatan masyarakat Ciamis dalam aksi 212 yang cukup menarik perhatian publik dimana mereka melakukan *long march* atau berjalan kaki dari Ciamis menuju Jakarta untuk ikut dalam aksi 212. Dikutip dari laman Okezon.com, Aksi tersebut dilakukan menyusul tidak adanya fasilitas bus yang mengangkut mereka dalam demonstrasi tersebut. Masyarakat yang terdiri dari berbagai elemen organisasi Islam dan para santri se-Kabupaten Ciamis itu berkumpul di Masjid Agung Ciamis. (Agregasi Sindonews.com, 2016)

Fenomena tersebut sangat menunjukkan bahwa religiusitas masyarakat ciamis sangat kental dengan nuansa keislaman. Hal itu juga menjadi dugaan penulis mengapa Kabupaten Ciamis dipilih sebagai lokasi kampanye dari Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 dan tidak memilih kabupaten/kota lain yang secara demografis maupun geografis lebih banyak dan lebih besar daripada Ciamis. Dari segi statistik, Kabupaten ciamis juga termasuk kedalam wilayah yang memiliki pondok pesantren yang cukup banyak dan berada di urutan ke 7 dari 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat dengan jumlah 440 unit (Setda Provinsi Jawa Barat, 2020)

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Strategi Politik Gerindra dalam Meningkatkan Elektabilitas Suara pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Ciamis.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut, bagaimana strategi politik yang dilakukan Partai Gerindra untuk meningkatkan elektabilitasnya pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Ciamis?

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk lebih memfokuskan penelitian ini maka penulis memberikan pembatasan pada permasalahan yang akan dibahas pada bagian pembahasan. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini pembahasan masalah hanya akan terbatas pada bagaimana strategi politik Partai Gerindra dalam meningkatkan elektabilitas suara pada Pemilu 2019 tidak termasuk dengan strategi politik dari Individu atau calon legislatif dari Partai Gerindra.
2. Permasalahan hanya akan terbatas pada analisis strategi politik di tingkat Dapil (Daerah Pemilihan) yakni di Dapil 1 sebagai dapil yang memiliki perolehan suara dan perolehan kursi yang paling banyak diantara Dapil yang lain

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi atau langkah-langkah yang dilakukan Partai Gerindra dalam meningkatkan elektabilitasnya pada Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Ciamis.

2. Untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan Ilmu Politik khususnya dalam diskursus kajian tentang partai politik.
3. Untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian politik lokal di Kabupaten Ciamis.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

- 1) Sebagai bahan kajian bagi pemerintah dalam melakukan perbaikan elektoral di tingkat lokal khususnya di wilayah Kabupaten Ciamis.
- 2) Sebagai bahan kajian bagi penyelenggara Pemilu seperti KPU dan BAWASLU dalam melakukan evaluasi serta upaya perbaikan dalam penyelenggaraan Pemilu di tahun-tahun berikutnya.
- 3) Sebagai bahan kajian bagi Partai Gerindra khususnya untuk melakukan analisis terhadap efektifitas strategi yang dilakukan pada Pemilu tahun 2019 dan menyusun strategi untuk menghadapi Pemilu selanjutnya.
- 4) Sebagai bahan kajian bagi partai lain dalam melihat strategi yang dilakukan oleh Partai Gerindra serta menyusun program dan strategi yang efektif untuk bisa bersaing dengan Partai Gerindra dalam mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Kabupaten Ciamis dalam rangka peningkatan kualitas politik lokal di Kabupaten Ciamis.
- 5) Sebagai bahan kajian di lingkungan akademik dalam memahami konstelasi politik lokal di Kabupaten Ciamis.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

- 1) Sumbangan pemikiran dan pengetahuan untuk pengembangan khasanah keilmuan dalam disiplin ilmu politik khususnya dalam diskursus kajian tentang partai politik yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam menelaah kajian-kajian tentang partai politik lainnya.
- 2) Rancangan teoritis untuk mengkaji bagaimana strategi politik Gerindra dalam menghadapi Pemilu 2024.
- 3) Rancangan teoritis untuk melakukan penelitian terkait strategi politik Partai Gerindra secara keseluruhan atau melakukan perbandingan dengan strategi politik Gerindra di satu wilayah dengan wilayah lainnya.